

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mengendalikan jumlah pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dilandasi dengan latar belakang luas wilayah Kota Yogyakarta yang relatif sempit, namun jumlah hotel yang ada relatif besar jumlahnya, sehingga perlu dibentuk suatu peraturan untuk menyeimbangkan hal tersebut. Selain hal itu, penerbitan peraturan walikota ini juga ditujukan untuk menjaga kualitas pelayanan pariwisata di Kota Yogyakarta. Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pengendalian Pembangunan Hotel juga dipergunakan untuk mengkaji apakah jumlah hotel di Kota Yogyakarta sudah mencukupi kebutuhan atau masih perlu ditambah lagi, pengkajian ini dapat dilakukan setelah moratorium pembangunan hotel berakhir. Selain hal tersebut, peraturan walikota ini dibentuk untuk melindungi usaha-usaha perhotelan yang telah ada di wilayah Kota Yogyakarta, dengan demikian usaha perhotelan yang telah ada dapat berkompetisi secara sehat.

Selain hal di atas, berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan, disimpulkan pula bahwa dari penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel

menimbulkan dampak terhadap permohonan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Dampak yang timbul adalah jumlah permohonan IMB yang semakin meningkat yang masuk pada Dinas Perizinan Yogyakarta. Setelah peraturan walikota tersebut diundangkan pada 20 November 2013, permohonan IMB bangunan hotel yang masuk pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta mencapai 104 permohonan IMB bangunan hotel hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan sebelum masa moratorium dimulai, yakni 1 Januari 2014. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, hingga per 10 November 2014 Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tersebut telah menerbitkan sejumlah 76 IMB bangunan hotel yang dimohonkan setelah adanya Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Selain itu masih ada 28 permohonan IMB yang masih dalam pemrosesan dan belum diterbitkan izinnya. Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya peraturan mengenai pengendalian pembangunan hotel tidak serta merta dapat mengendalikan pembangunan hotel secara signifikan hingga 0 %. Permohonan IMB bangunan hotel yang masuk sebelum 1 Januari 2014 tetap diproses izinnya menurut peraturan perundangan yang berlaku, sehingga menyebabkan investor justru berlomba-lomba untuk memasukkan IMB bangunan hotel. Momentum moratorium menjadikan para investor untuk memasukkan IMB bangunan hotel meskipun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi masih kurang lengkap, yang terpenting adalah permohonan IMB telah masuk dan dapat diproses, sehingga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian

Pembangunan Hotel dirasa kurang efektif untuk menekan pembangunan hotel. Selain itu ketidakjelasan mengenai bagaimana atau apa langkah selanjutnya setelah masa moratorium berakhir menjadikan peraturan walikota ini mengambang. Apabila masa moratorium telah berakhir dan tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap peraturan walikota tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak lagi permohonan IMB hotel yang akan masuk pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Sudah barang tentu IMB bangunan hotel yang masuk akan diproses dan akan terbit izinnya apabila semua persyaratan telah dipenuhi.

B. Saran

Berdasarkan rumusan dan uraian pembahasan, serta kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan oleh Penulis yakni:

1. Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan instansi lain yang berkaitan dengan masalah pembangunan, perizinan maupun penataan kota sebaiknya saling bekerjasama dalam sebuah pembuatan regulasi atau peraturan. Ke depannya dalam pembuatan regulasi atau peraturan, antar instansi-instansi tersebut harus saling berkomunikasi dengan baik sehingga tercipta peraturan yang dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuannya.
2. Pembuatan sebuah peraturan atau regulasi untuk ke depannya hendaknya memperhatikan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, dengan

demikian peraturan atau regulasi yang dibuat selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum, Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Drs. Djumhanas, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bakti Bandung
- Pusat Bahasa Depdikbud, 2001, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Sadu Wasistiono, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Jakarta
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.

Jurnal:

- Didik Surya Hadi, Setiaji Hari Saputro, Hastanto Bowo Woesono, 2012, *Pengaruh Tingkat Luasan RTH Privat Terhadap Kualitas Udara dan Persepsi Kenyamanan di Kota Yogyakarta*, Jurnal Penelitian ISSN. 1978-0052.
- Fani Cahyandito, 2009, *Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi, Sustainability, Communication dan Sustainability Reporting*, Jurnal Pustaka Universitas Padjajaran.

Website:

- www.atmajayaneews.wordpress.com, Haryorachmanto Wijowarastro, Yogyakarta *Berhati Nyaman?*, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014.
- www.republika.co.id, Bilal Ramadhan, *Pemkot Yogyakarta Masih “Bandel” Soal Izin Pendirian Hotel*, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014.

www.kbbi.web.id, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014

www.hukum.jogjakota.co.id, *Pengendalian Pembangunan Hotel di Yogyakarta*, diunduh pada tanggal 31 Agustus 2014.

www.jogjakota.go.id, Didik Surya Hadi, Setiaji Hari Saputro, Hastanto Bowo Woosono, 2012, *Pengaruh Tingkat Luasan RTH Privat Terhadap Kualitas Udara dan Persepsi Kenyamanan di Kota Yogyakarta*, Jurnal Penelitian ISSN. 1978-0052, diunduh pada tanggal 30 Agustus 2014.

www.pustaka.unpad.ac.id, Fani Cahyandito, 2009, *Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi, Sustainability, Communication dan Sustainability Reporting*, Jurnal Pustaka Universitas Padjajaran, diunduh pada tanggal 2 September 2014.

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196412041990012-LELI_YULIFAR/Sylabus,_SAP,_Hand_out,_Handbook/Hand_Out_Sosbanng2.pdf, hand out Sosiologi dan Antropologi Pembangunan oleh Dra. Leli Yulifar, M.Pd, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014.

www.rennydund.wordpress.com, Rennydund, *Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan*, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014.

www.negarahukum.com, Damang, S.H., *Perizinan*, diunduh pada tanggal 31 Agustus 2014.

www.jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisi-hotel.html, Denny Bagus, *Pengantar Perhotelan: Definisi Hotel, Karakteristik, Jenis, dan Klasifikasi Hotel*, diunduh pada tanggal 2 September 2014.

www.travel.kompas.com, *Hotel Baru di Yogyakarta*, diunduh pada tanggal 5 November 2014.

www.repository.usu.ac.id, F.A.Ginting, *Tinjauan Umum tentang Perizinan*, diunduh pada tanggal 15 Februari 2015.

www.perizinan.jogjakota.go.id, *Jenis Izin dan Syarat, Prosedur Pelayanan Perizinan*, diunduh pada tanggal 24 Februari 2015.

www.izinbangunan.com, *Perizinan Bangunan Pengertian dan Definisi*, diunduh pada tanggal 25 Februari 2015.

www.rumahku.com, *Pentingnya IMB dan IPB Sebuah Bangunan*, diunduh pada tanggal 25 Februari 2015.

www.indrashare.com, *Melihat Potensi Tempat Wisata Yogyakarta*, diunduh pada tanggal 25 Februari 2015.

www.e-journal.uaajy.ac.id, Gerry Utama Pribadi, *Hotel Konvensi di Daerah Istimewa Yogyakarta*, diunduh pada tanggal 25 Februari 2015.

www.yogyakarta.bps.go.id, *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2013*, diunduh pada tanggal 25 Februari 2015.

www.academia.edu, *Teori Pembangunan Kota Berkelanjutan (Urban Sustainable Development)*, diunduh pada tanggal 3 Maret 2015.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Izin Terpadu

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel

